

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hasil survey yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* menyatakan sistem pendidikan di Indonesia sangat buruk untuk kawasan Asia dari 13 negara yang disurvei, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul oleh Singapura, Jepang, Taiwan, India, Cina dan Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12, setingkat dibawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Rendahnya sistem pendidikan di Indonesia sangat terkait dengan kinerja guru, yang menjadi ujung tombak dunia pendidikan. Rendahnya kinerja guru diakibatkan akibat rendahnya kompetensi guru. Hal tersebut terbukti dengan nilai UKG yang masih rendah. Pada 2015 nilai rata-rata guru secara nasional untuk guru TK sebesar 43,74 poin, guru SD 40,14 poin, guru SMP 44,14 poin dan guru SMA 45,38 poin; sampai pada UKG 2017, nilai rata-rata belum mencapai 70 poin. Data rerata hasil UKG Bali menunjukkan nilai UKG Masih di bawah 70 poin antara lain SD 57,29; SMP 61,70; SMA 66,05; dan SMK 62,74. Rendahnya kompetensi guru tentunya mendukung rendahnya kinerja guru khususnya guru ASN.

Data BKN (Badan Kepegawaian Negara) menunjukkan bahwa saat ini terdapat hampir 4 juta lebih pegawai ASN di Indonesia. Tidak memadainya

kualitas kerja pegawai ASN disebabkan akibat tidak berimbangnya rasio antara jumlah pegawai ASN dengan para *Stakeholders*-nya, selain rendahnya kompetensi para pegawai ASN yang bersangkutan. ASN mestinya memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Guru ASN sebagai ASN berfungsi sebagai: (1) pelaksana kebijakan publik; (2) pelayan publik; dan (3) perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi ASN ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Guru memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 2004, memperkuat peran guru dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagaimana diketahui Undang-undang guru dan Dosen secara eksplisit mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan Keprofesian berkelanjutan dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Keprofesian guru sangat penting untuk diukur kinerjanya.

Tugas guru secara profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah¹. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal. Guru sebagai *learning agent* (agen pembelajaran) yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 pasal 8 tersebut disebutkan pula bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi dan Diklat Latsar CPNS. Kompetensi yang

¹ Ibid, Pasal 1

harus dimiliki oleh guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 adalah sebagai berikut.

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi anak didik maupun bagi masyarakat. Sikap anti korupsi yang ditunjukkan oleh guru akan nampak ketika guru memanfaatkan waktu seefisien mungkin guna mencapai target yang ditetapkan, berlaku adil kepada siswa tanpa membedakan siswa. Kepribadian yang stabil dan mantap bagi seorang guru tercermin dari sikap guru yang bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kompetensi kepribadian guru seperti yang telah diuraikan di atas merupakan bagian dari etika publik dan sikap anti korupsi yang ditanamkan saat guru mengikuti pendidikan dan latihan dasar PNS yang diharapkan dari pendidikan Latsar CPNS itu guru menjadi terhabituasi menerapkan etika publik dalam tugas kesehariannya.

2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Komitmen mutu menjadi agenda yang sangat penting diberikan

ketika peserta mengikuti Diklat Latsar CPNS dimana Komitmen Mutu merupakan ukuran atau gambaran bagi guru bahwa guru telah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik sampai pada tahap akhir yaitu evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Selain itu guru juga harus melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan nilai akuntabilitas terhadap apa yang telah dilaksanakannya terkait dengan pembelajaran dalam bentuk laporan sebagai bagian dari persyaratan ketika guru melakukan sertifikasi.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Guru yang mencintai anak didiknya dan bangga melayani Bangsa adalah cerminan dari guru yang memiliki sikap nasionalisme. Guru dengan nilai nasionalisme yang tinggi akan selalu sukarela dalam memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan siswa dan mendengar apa yang menjadi keluhan orang tua siswa.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional yang menjadi syarat bagi guru

adalah merupakan bagian dari tuntutan komitmen mutu pendidikan dimana guru harus selalu mengedepankan mutu pendidikan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Sudarmanto² juga menyebutkan bahwa kompetensi adalah atribut untuk meletakkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dan unggul. Atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Tugas guru secara profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru

² Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM” . Yogyakarta : Pustaka Pelajar

merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pendidikan atau pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah.

Semestinya guru memiliki kinerja optimal dalam rangka mewujudkan sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Pertama, guru harus mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Artinya, komitmen tinggi guru adalah untuk kepentingan siswa. Kedua, guru harus menguasai secara mendalam bahan atau materi pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Artinya, antara pemahaman materi dan metode pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dari pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.

Peningkatan kinerja guru terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya, baik melalui program sertifikasi guru, melakukan pengembangan kurikulum nasional dan local, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah sampai pada pemberian uang sertifikasi guru.

Faktanya, menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan menyatakan sertifikasi belum mampu menunjukkan kinerja guru, masih berupa procedural untuk memperoleh tunjangan saja. Dinyatakan juga, bahwa program sertifikasi guru belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja guru yang masih

rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kinerja guru terhadap pembinaan siswa dipengaruhi oleh factor internal, yaitu kemampuan dan motivasi guru, dan factor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan kerja fisik, dan manajemen kepala sekolah.

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pendidikan atau pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah.

Semestinya guru memiliki kinerja optimal dalam rangka mewujudkan sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Pertama, guru harus mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Artinya, komitmen tinggi guru adalah untuk kepentingan siswa. Kedua, guru harus menguasai secara mendalam bahan atau materi pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Artinya, antara pemahaman materi dan metode pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dari pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.

Peningkatan kinerja guru terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya, baik melalui program sertifikasi guru, melakukan pengembangan kurikulum nasional dan local, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan,

pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Kinerja guru yang berkualitas akan berpengaruh pada mutu pembelajaran, mutu lulusan, mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan. Namun, berdasarkan laporan PISA yang baru rilis, Selasa 3 Desember 2019, skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, lau skor matematika ada di peringkat 72 dan 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 80 negara. Hal tersebut menurun dari nilai PISA sebelumnya, artinya belum ada peningkatan kinerja guru yang berdampak pada peningkatan kemampuan siswa.

Hal senada ditunjukkan dari hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 2 Tegaljadi dimana masih terdapat beberapa guru yang memiliki kinerja serta motivasi kurang. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa guru yang memiliki kinerja serta motivasi mengajar rendah.³

Dari hasil pengawasan terhadap kinerja guru SD pada Kota Denpasar berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dapat disampaikan sebagai berikut : guru yang membuat rencana pembelajaran 48,75% (termasuk katagori rendah, yang menerapkan metode pembelajaran bervariasi 56,25% (tergolong cukup), yang melakukan pembelajaran secara sistimatis dan kontekstual 69,25% (tergolong tinggi), yang menggunakan media pembelajaran 53,00% (tergolong cukup), yang menindaklanjuti hasil penilaian 72,25% (tergolong cukup), sedangkan guru yang memiliki kompetensi profesional 44,75% termasuk katagori kurang (Pengawas

³ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsYklTwhdCu-Kt6-es--8AKQoljYg:1663976994581&q=%22observasi%22+yang+dilakukan+di+SD+Negeri+2+Tegaljadi&sa=X&ved=2ahUKEwjHobStjaz6AhUyA7cAHeYNDcQQ5t4CegQIDhAB&biw=1280&bih=595&dp r=1.5>

sekolah, 2019-2020) . Hasil penilaian kinerja berkaitan dengan komitmen para guru terhadap pengembangan sekolah tergolong cukup yaitu ada 60,00% yang aktif dalam kegiatan sedangkan guru yang memiliki kreatifitas ada 56,75% dari penilaian pengawas sekolah . Berkaitan data ini masih ada guru yang merasa bahwa profesinya kurang membanggakan sedangkan guru yang berusia di atas 40 tahun terdapat kecenderungan semangatnya menurun terutama terhadap kegiatan sekolah untuk meningkat kualitas pendidikan.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramartha, dkk.(2016)⁴ tentang Kinerja Guru Pendidikan Agama Hindhu di Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar, ditemukan masih banyak keluhan yang timbul pada pelaksanaan pembelajaran. Orang tua mengeluhkan masalah ujian dan tugas yang hanya berorientasi banyak pada penghafalan, siswa mengeluhkan soal strategi belajar, dan penilaian yang berbeda-beda antara guru satu dengan guru yang lainnya. Belum lagi soal absensi/presensi dan keterlambatan guru dalam kelas, yang menjadi keprihatinan orang tua dan siswa. Sementara beberapa Sekolah Dasar terkenal. memiliki prosedur pembelajaran yang sangat teratur, sedangkan sekolah yang .lainnya banyak yang membiarkan guru-guru memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam aturan belajar. Hal ini mencerminkan kinerja guru yang kurang, dan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi guru. Dari beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa kinerja Guru di Kota Denpasar belum terwujud secara optimal.

⁴ Paramartha, dkk.(2016), Laporan Penelitian tentang Kinerja Guru Pendidikan Agama Hindhu di Sekolah Negeri di Kota Denpasar, 2016

Berdasarkan hal tersebut perlu dipertimbangkan hubungan variabel lain selain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru ASN, seperti kinerja ASN, khususnya guru dipengaruhi oleh akuntabilitas, nasionalisme, etika publik/etika profesi guru, komitmen mutu, dan sikap antikorupsi.

Akuntabilitas mengacu pada harapan implisit atau eksplisit bahwa keputusan atau tindakan seseorang akan dievaluasi oleh pihak lain dan hasil evaluasinya dapat berupa *reward* atau *punishment*. Akuntabilitas yang dilakukan oleh PNS khususnya guru ASN akan teruji ketika ASN tersebut mengalami permasalahan dalam transparansi dan akses informasi, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan sumber daya milik Negara dan konflik kepentingan. Seorang guru ASN dapat dikatakan ASN yang akuntabel apabila mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam artian mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang guru ASN adalah menjamin terwujudnya pendidikan terbaik untuk anak bangsa dengan secara optimal mengembnagkan kompetensinya sebagai guru.

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia: (1) menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; (2) menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan

Negara; (4) mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; dan (5) menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Etika publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Khusus untuk guru mengemban etika publik berupa etika profesi guru. Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Komitmen mutu adalah komitmen terhadap nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan (*customer*) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) khususnya di dunia pendidikan sudah diupayakan di era reformasi saat ini. Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk mewujudkan hal tersebut, namun dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan, misalnya: (1) terkait dengan maraknya kasus korupsi, sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien; (2) banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai, sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan; (3) kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat *rule driven* dan sebatas menjalankan rutinitas kewajib, sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi; serta (4) masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan

aparatur, sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Hal ini merupakan tantangan bagi guru ASN untuk menampilkan kinerja inovatif yang berkomitmen terhadap mutu untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan lebih baik.

Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada mutu pelayanan sudah tidak bisa ditawar lagi ketika satuan sebagai bagian dari lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pendidikan nasional. Apabila setiap satuan pendidikan dapat memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada *stake holder* maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa mutu layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah, layanan prima di dunia pendidikan mestinya lebih ditingkatkan dan digalakkan.

Selain itu, penanaman nilai-nilai antikorupsi pada guru, siswa dan semua komponen satuan pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk membentuk moralitas yang baik. Perlu ditingkatkan keteladanan dari lingkungan khususnya di satuan pendidikan (orang tua, guru, orang dewasa di sekitar, pejabat pemerintahan dan media. Dimana perkataan, sikap dan perilaku dari guru sebagai ujung tombak dunia pendidikan harus dapat menjadi contoh keteladanan bagi siswa atau anak. Jika tidak, maka anak-anak akan bertindak tanpa arah dan bahkan dapat menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang berlaku, meskipun kadang-kadang hal tersebut tidak disadarinya.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

substansi materi pendidikan antikorupsi dirumuskan dalam kurikulum kelas V semester I, kelas VIII semester I dan kelas X semester I. agar pesan dan nilai antikorupsi ini dapat tersampaikan kepada peserta didik, terlebih dahulu guru mesti memberikan tauladan terkait sikap-sikap yang menunjukkan antikorupsi. Ini jelas tugas tambahan untuk menanamkan karakter bangsa antikorupsi kepada peserta didik yang menjadi bagian kinerja dari guru kedepannya.

Ketika guru yang menjadi Aparatur Sipil Negara, maka sejatinya ia telah menjadi bagian dari “kekuasaan” yang tindak tanduknya berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat luas. Masyarakat memiliki tuntutan dan harapan yang tinggi kepada ASN. Saking tingginya harapan masyarakat, tidak mengherankan kalau perilaku yang kurang terpuji yang dilakukan ASN akan menjadi sorotan tajam, menjadi bahan sindiran, bulan-bulanan, hinaan, cemoohan, bahkan cacian. Hal demikian tidak hanya berlaku Negara-negara yang memiliki budaya ketimuran bahkan di Negara-negara liberal yang menjunjung tinggi kebebasan individu, standar etika bagi orang-orang yang mengatur kepentingan masyarakat khususnya pendidikan yang dilakukan oleh guru lebih tinggi dibanding standar etika yang berlaku pada masyarakat umum. Contohnya, kasus perselingkuhan yang melibatkan guru, kepala sekolah, atau pejabat public bisa dijadikan bahan untuk melakukan pelengseran apalagi kasus yang berhubungan langsung dengan kepentingan public, semisal korupsi proyek pengadaan, penyuapan, atau penyalahgunaan jabatan. Ekspektasi yang tinggi terhadap penyelenggara sistem pendidikan yang baik termasuk guru yang menjadi Aparatur Sipil Negara, jika berbanding terbalik dengan perilaku yang ditunjukkan oleh

mereka, akan melahirkan sinisme dan sarkasme public, lebih jauh public kehilangan kepercayaan terhadap dunia pendidikan.

Adanya gap atau perbedaan antara kajian teoritik dengan fakta di lapangan guna meningkatkan mutu pendidikan melalui kinerja guru maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kemungkinan adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja guru, seperti variabel ANEKA yang merupakan akronim dari (akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan sikap anti korupsi) terhadap kinerja guru.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah belum ada penelitian yang meneliti hubungan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Public, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) secara komprehensif terhadap kinerja Guru ASN, namun yang ada hanya secara parsial, atau tersendiri saja, dengan demikian model penelitian yang menghubungkan varfiabel (ANEKA) terhadap kinerja guru adalah merupakan model yang baru.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mutu SDM Indonesia yang rendah merupakan sebuah gambaran mutu pendidikan yang juga rendah. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kinerja guru. Berdasarkan fakta di lapangan yang ditunjukkan dari hasil penelitian seperti yang disampaikan pada latar belakang di atas, penulis ingin mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan penelitian ini.

- 1) Guru ASN Kota Denpasar tergolong memiliki disiplin yang tergolong masih rendah dalam membuat rencana pembelajaran.

- 2) Guru ASN Kota Denpasar memiliki komitmen masih rendah dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
- 3) Guru ASN Kota Denpasar dinilai kurang kreatif atau inovasi menerapkan metode pembelajaran.
- 4) Guru ASN Kota Denpasar dinilai kurang memiliki jiwa nasionalisme utamanya yang berumur 40 tahun ke atas ditandai dengan kecenderungan semangatnya menurun terutama terhadap kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
- 5) Guru ASN Kota kurang berintegritas terhadap lembaga dan sekolah tempatnya bekerja, ditunjukkan dengan tidak adanya kebanggaan menjadi guru.
- 6) Guru ASN Kota Denpasar dinilai berkinerja rendah dan sertifikasi tidak menjamin kinerja guru.
- 7) Akuntabilitas belum terimplementasi secara optimal dalam kinerja guru ASN Kota Denpasar, dimana antara perencanaan, proses, evaluasi dan hasil dalam tugas utamanya sebagai guru sering berbeda dan tidak sesuai yang ditargetkan, selain itu guru tidak memiliki ukuran yang jelas untuk mengukur ketercapaian target kinerja yang mereka harus capai.
- 8) Jiwa nasionalisme Guru ASN Kota Denpasar kurang terimplementasi dengan baik, dimana seharusnya guru memiliki rasa bangga sebagai guru yang ditunjukkan dengan menurunnya semangat guru terutama dalam melakukan kegiatan sekolah.

- 9) Etika publik guru kurang terimplementasi, dimana guru dalam menjalin komunikasi dengan para orang tua murid belum maksimal, terbukti orang tua murid sering mengeluhkan perilaku guru yang tidak terbuka dalam menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan pembelajaran.
- 10) Guru ASN masih memiliki kinerja dan motivasi yang rendah.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Guna menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian perlu kiranya diberikan pembatasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan juga untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, sehingga penelitian tersebut lebih terarah. Dengan demikian, pembahasan menjadi semakin mudah dan tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini dibatasi pada pengkajian akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan sikap anti korupsi dalam pengaruhnya terhadap kinerja guru.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

- 1) Apakah model hubungan antar-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja guru terbukti secara empiris?
- 2) Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja guru ASN?
- 3) Bagaimana pengaruh nasionalisme terhadap kinerja guru ASN?
- 4) Bagaimana pengaruh etika publik terhadap kinerja guru ASN?
- 5) Bagaimana pengaruh komitmen mutu terhadap kinerja guru ASN?
- 6) Bagaimana pengaruh sikap anti korupsi terhadap kinerja guru ASN?

- 7) Bagaimana pengaruh secara bersama sama akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan sikap anti korupsi terhadap kinerja guru ASN

1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi (ANEKA) terhadap kinerja guru ASN angkatan tahun 2019 di Kota Denpasar. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan model hubungan antar-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja guru.
- 2) Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja guru ASN
- 3) Mengetahui pengaruh nasionalisme terhadap kinerja guru ASN
- 4) Mengetahui pengaruh etika publik terhadap kinerja guru ASN
- 5) Mengetahui pengaruh komitmen mutu terhadap kinerja guru ASN
- 6) Mengetahui pengaruh sikap anti korupsi terhadap kinerja guru ASN
- 7) Mengetahui pengaruh secara bersama sama akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan sikap anti korupsi terhadap kinerja guru ASN

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat berguna menambah kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya kajian kinerja guru terkait dengan variabel akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan sikap anti korupsi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Pemerintah Pusat

Secara praktis nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah khususnya LAN Jakarta tentang perlunya pengembangan variabel ANEKA (akuntabilitas, nasionalisme, etika public, komitmen mutu, dan sikap anti korupsi) untuk meningkatkan kinerja guru ASN. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai patokan prioritas komponen ANEKA yang perlu ditekankan untuk membangun kinerja guru ASN yang lebih baik khususnya pada saat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS).

1.6.2.2 Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan materi mana dari ANEKA ini yang memberikan pengaruh yang paling besar terhadap kinerja guru ASN. Berdasarkan hasil penelitian ini dinas pendidikan dapat mengambil kebijakan pengembangan bagian ANEKA yang paling berpengaruh terhadap kinerja guru ASN melalui kegiatan pendidikan dan atau pelatihan, sehingga hasil kegiatan lebih efektif dan efisien.

1.6.2.3 Bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam fungsi melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; pengembangan dan

pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan; fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; dan pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan perlu memperhatikan pengembangan dan usaha peningkatan kinerja guru. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan dalam menentukan indikator penilaian/supervisi sekolah khususnya terkait kinerja guru dan nilai-nilai ANEKA yang dimiliki guru ASN.

1.6.2.4 Bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan BKD dalam perencanaan pengembangan kepegawaian daerah dan penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah khususnya prioritas pada pengembangan nilai-nilai ANEKA untuk meningkatkan kinerja guru.

1.6.2.5 Bagi Pengawas

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam memberikan evaluasi saat melakukan supervisi manajerial dan supervisi akademik terhadap kepala sekolah maupun guru di sekolah khususnya terkait pengembangan nilai-nilai ANEKA untuk meningkatkan kinerja guru.

1.6.2.6 Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat oleh kepala sekolah sebagai sebagai dasar melaksanakan tugas manajerial dan supervisor dalam memantau, membina, dan memperbaiki proses belajar mengajar di kelas yang dilakukan oleh guru dan mengembangkan komponen ANEKA guna dapat meningkatkan kinerja guru menjadi lebih baik.

1.6.2.7 Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai dasar peningkatan kinerja dan implementasi nilai-nilai ANEKA yang mendukung peningkatan kinerjanya.

1.6.2.8 Bagi Peneliti Selanjutnya

Keterbatasan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai peluang melakukan penelitian selanjutnya, selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan mengembangkan jenis variabel, metode yang digunakan, atau populasi penelitian yang lebih luas.



